



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini memberi Instruksi:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tanggal 23 Januari 2024  
Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan  
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu arah kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah pemerintah fokus terhadap peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan tata kelola dan kinerja, hal tersebut juga sudah diamanatkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif, serta birokrasi yang berintegritas, sehingga strategi dan arah kebijakan negara, dengan menetapkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial yaitu meliputi:

1. Audit;
2. Reviu;
3. Evaluasi;
4. Pemantauan atau Monitoring; dan
5. Kegiatan pengawasan lainnya.

---

#### **Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



## B. Tujuan

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2024;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Yudisial;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

---

### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

## KONDISI DAN TANTANGAN

### A. Kondisi

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi APIP, yaitu:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan PKPT Tahun 2024 dilakukan oleh APIP pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 5 (lima) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan minimal dalam 1 (satu) tim, meliputi tugas audit, reviu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim, sebagai berikut:

| NO | NAMA                | JABATAN       | PERAN                |
|----|---------------------|---------------|----------------------|
| 1  | R. Adha Pamekas     | Kepalaa Biro  | Penanggungjawab      |
| 2  | Ahmad Djaludin      | Kepala Bagian | Koordinator Pengawas |
| 3  | Andri Nurselan      | Auditor       | Pengendali Teknis    |
| 4  | Fajar Dewo Sukmono  | Auditor       | Ketua Tim            |
| 5  | M. Iqbal Heriansyah | Auditor       | Anggota Tim          |
| 6  | Dita Yufitasari     | Auditor       | Anggota Tim          |
| 7  | Muthmainatul Ula    | Auditor       | Anggota Tim          |

#### 2. Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan, Bagian Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:



#### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| KODE                | KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp.)       |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>5267.EBD.965</b> | <b>Layanan Audit Internal</b>   | <b>1.000.000.000</b> |
| 052.A               | Terlaksananya Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) APIP Semester I Tahun 2024 | 113,317,000          |
| 061.A               | Terlaksananya Audit Kinerja   | 315,682,000          |
| 060.A               | Terlaksananya Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   | 57,268,000           |
| 062.A               | Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Sesuai Perintah Pimpinan)  | 143,280,000          |
| 053.A               | Tersusunnya Laporan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan Eksternal      | 16,600,000           |
| 054.A               | Terlaksananya Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025  | 990,000              |
| 054.B               | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LK)   | 990,000              |
| 054.C               | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat   | 990,000              |
| 055.A               | Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  | 11,300,000           |
| 051.A               | Terlaksananya Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal   | 7,600,000            |
| 056.A               | Terlaksananya Penerapan dan Pengembangan SPIP   | 145,613,000          |
| 057.A               | Terlaksananya Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)  | 184,390,000          |
| 058.A               | Terlaksananya Asistensi Penyusunan LHKPN, Pelaporan SPT Dan Gratifikasi   | 990,000              |
| 058.B               | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB  | 990,000              |

## B. Tantangan

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme, dan kinerja APIP yang efisien, efektif dan *agile*.

### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

## PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024

### A. Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 pasal 42, disebutkan: “Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal”, berdasarkan rumusan tersebut ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e) Pengelolaan ketatausahaan terkait kepatuhan internal.

### B. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah seluruh Biro/Pusat di Lingkungan Komisi Yudisial, yang terdiri dari:

1. Biro Umum
2. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
3. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
5. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
6. Biro Investigasi
7. 20 (dua puluh) Kantor Penghubung Komisi Yudisial

---

#### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE** 

| NO           | OBYEK   | ANGGARAN (Rp.)            | SIFAT AKTIVITAS (R/S/T) | MATERIALITAS (R/S/T) |         | TERAKHIR DIAUDIT (Tahun) | TINGKAT RISIKO (R/S/T) | OVERALL RATING |               | AUDIT APPROACH                   | FOKUS PENGAWASAN  |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---|
|              |   |                           |                         | %                    | TINGKAT |                          |                        | SKOR           | SKALA         |                                  |   |
| 1            | Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)                  | Rp 12.197.540.000         | 2                       | 6,50%                | T       | 2023                     | S                      | 1,9            | Tinggi        | Quality Assurance dan Consulting | Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga Profiling Hakim |
| 2            | Biro Investigasi (3866)   | Rp 5.204.501.000          | 1                       | 4,25%                | T       | 2023                     | T                      | 1              | Menengah      |                                  |   |
| 3            | Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas hakim (3872) | Rp 18.098.732.000         | 2                       | 8,65%                | T       | 2023                     | S                      | 2,1            | Tinggi        |                                  | Seleksi Calon Hakim Agung   |
| 4            | Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)                           | Rp 10.002.032.000         | 2                       | 5,54%                | T       | 2023                     | T                      | 2,1            | Tinggi        |                                  | Penanganan Laporan Masyarakat                                     |
| 5            | Biro Umum (3867)  | Rp 107.897.297.000        | 3                       | 67,68%               | T       | 2023                     | T                      | 2,8            | Sangat Tinggi |                                  | Penataan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa dan Aset BMN |
| 6            | Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)                     | Rp 17.466.460.000         | 1                       | 7,38%                | T       | 2023                     | T                      | 1,4            | Menengah      |                                  | Penataan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>Rp 170.866.562.000</b> |                         | <b>100%</b>          |         |                          |                        |                |               |                                  |   |

Sasaran Obyek Pengawasan di atas disusun berdasarkan analisa risiko dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;
2. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat
3. Waktu terakhir di Audit
4. Hasil Audit Pemeriksaan/Pengawasan APIP/BPK T.A sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisa risiko tersebut didapatkan data sebagaimana berikut:

1. Besarnya alokasi anggaran, nilai materialitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat adalah sebagaimana alokasi pada DIPA T.A 2024 sebagaimana yang sudah tersajikan dalam tabel.

2. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat

Berdasarkan kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro Umum mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam mendorong fungsi teknis dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, penataan diawali melalui beberapa *tools* yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial, Kompleksitas tidak saja dari ruang lingkup pekerjaan namun berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Waktu terakhir di Audit

Biro/Pusat terakhir diaudit semester I 2023 oleh APIP KY dan T.A 2022 oleh BPK RI.

4. Hasil Audit Pemeriksaan/Pengawasan APIP/BPK T.A sebelumnya.

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe** 

Selain Biro/Pusat, terdapat 20 Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang menjadi obyek pengawasan. Berikut adalah Peta Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan persebaran risiko.



Tingkat risiko Penghubung Komisi Yudisial di daerah diperoleh dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan di tahun 2023 kepada 12 Penghubung KY. Sementara, untuk 8 Penghubung KY baru yang belum menjadi obyek pengawasan di tahun 2023, tingkat *maturity level* penerapan manajemen risikonya berada pada level Risiko Sangat Tinggi, karena belum terdapat hasil audit.

Kriteria risiko yang digunakan dalam menentukan tingkat risiko adalah sebagai berikut:

| INDEX | DAMPAK        | DESKRIPSI     | RENTANG       | DAMPAK TERHADAP SASARAN (Kualitatif)  | SIMBOL |
|-------|---------------|---------------|---------------|---|--------|
| 5     | Catastrophic  | Sangat Tinggi | < 20,00       | Tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja                                  |        |
| 4     | Significant   | Tinggi        | 20,00 - 39,99 | Tertundanya capaian sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target    |        |
| 3     | Moderate      | Sedang        | 40,00 - 60,00 | Tertundanya tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target           |        |
| 2     | Minor         | Rendah        | 60,01 - 80,00 | Tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target, target kinerja sedikit di bawah target |        |
| 1     | Insignificant | Sangat Rendah | > 80,00       | Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai |        |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe** Balai Sertifikasi Elektronik



Komisi Yudisial belum menerapkan manajemen risiko secara penuh dan terintegrasi, sehingga tingkat *maturity level* penerapan manajemen risiko berada pada level *Initial/Repeatable*. Pemilihan strategi audit terhadap tingkat *Maturity initial/repeatable* lebih banyak dilakukan pada kegiatan *consulting* (pendampingan manajemen risiko, sosialisasi, bimtek, klinik konsultansi) dan kegiatan *assurance* dilakukan dengan pendekatan pemetaan faktor risiko.

### C. Ukuran Keberhasilan

Bagian Kepatuhan Internal selaku APIP dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan anggaran memiliki indikator Capaian/ Keberhasilan yaitu mencapai Tujuan/ Penetapan Kinerja pada Sekretaris Jenderal (Eselon 1) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan internal (Eselon 2) dengan penjelasan sebagai berikut:

Target Kinerja Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal:

| RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KEBRHASILAN  | TARGET NILAI | SATUAN     | KETERANGAN   |
|---|--|--------------|------------|--|
| <b>Sekretaris Jenderal (Eselon I)</b>                             |  |              |            |  |
| Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien                  | Meningkatnya layanan audit dan pengendalian internal         | Baik         | Persepsi   | Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB             |
| <b>Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (Eselon II)</b> |  |              |            |  |
| Meningkatnya layanan audit dan pengendalian internal              | Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti | 100          | Persentase | Berdasarkan Laporan Hasil Audit APIP Tahun 2024                |
|   | Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti | 90           | Persentase | Berdasarkan Hasil Pemantauan Resmi BPK Untuk Temuan Tahun 2023 |
|   | Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti             | 100          | Persentase | Berdasarkan Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi APIP Tahun 2024   |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

|  |                                  |      |       |   |
|--|----------------------------------|------|-------|---|
|  | Peningkatan nilai maturitas SPIP | 3.12 | Nilai | Berdasarkan Surat BPKP perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2023 |
|--|----------------------------------|------|-------|---|

Target Kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah:

| NO   | KOMPONEN KERJA                              | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|--|---|---|---|--------|---------|
|  |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
| <b>A. Program Kerja Pengawasan Tahunan</b> |   |   |   |        |         |
| 1  | Audit Operasional                           | Untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuannya yaitu mendukung kegiatan teknis dan operasional Komisi Yudisial RI | Jumlah Laporan Hasil Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) Semester I Tahun 2024 | 1      | Laporan |
| 2  | Audit Kinerja                               | Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E                                | Jumlah Laporan Audit Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah   | 1      | Laporan |
| 3  | Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   | Untuk memperoleh keyakinan bahwa SMKI sudah sesuai dengan ISO/IEC 27001:2022  | Jumlah Laporan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi  | 1      | Laporan |
| 4  | Audit Tujuan Tertentu                       | Audit yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi.   | Jumlah Laporan Audit Tujuan Tertentu  | 1      | Laporan |
| 5  | Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi | Untuk memperoleh keyakinan bahwa implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal No.9  | Jumlah Laporan Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi  | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT   | VOLUME |         |
|----|---|---|--|--------|---------|
|    |   |   |  | TARGET | SATUAN  |
|    | Sekretaris Jenderal 9/2023  | Tahun 2023 sudah sesuai   | Sekretaris Jenderal No.9 Tahun 2023  |        |         |
| 6  | Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025                            | Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L   | Jumlah Laporan Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025                                      | 1      | Laporan |
| 7  | Reviu Pengawasan PNBPN Tahun 2024   | Mendorong kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBPN   | Jumlah Laporan Reviu Pengawasan PNBPN Tahun 2024   | 1      | Laporan |
| 8  | Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024   | Untuk memperoleh keyakinan terbatas, serta sebagai upaya meningkatkan pengendalian dan manajemen risiko dalam PBJ   | Jumlah Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Per Triwulan  | 4      | Laporan |
| 9  | Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, SMTR I Tahun 2024 dan TW III Tahun 2024 | Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Komisi Yudisial sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024 | 3      | Laporan |
| 10 | Reviu PIPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023                                |   | Jumlah Laporan Reviu PIPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023  | 1      | Laporan |
| 11 | Reviu RKBMN 2026  | Agar rencana kebutuhan BMN tepat manfaat serta mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan TUSI   | Jumlah Laporan Reviu RKBMN 2026  | 1      | Laporan |
| 12 | Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                           | Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas                                | Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                                     | 8      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT   | VOLUME |         |
|----|---|---|--|--------|---------|
|    |   |   |  | TARGET | SATUAN  |
| 14 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                          | Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi, Satker maupun seluruh unit kerja Eselon II, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil | Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  | 8      | Laporan |
| 15 | Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP                                | Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY)  | Jumlah Laporan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP Per Triwulan   | 4      | Laporan |
| 16 | Pendampingan Pemeriksaan BPK RI   | Fasilitasi dan membangun koordinasi serta kelancaraan pelaksanaan pemeriksaan BPK   | Jumlah Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023   | 1      | Laporan |
| 17 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 | Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Eksternal (BPK RI)  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Per Triwulan | 4      | Laporan |
| 18 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP                    | Untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil reviu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP Per Triwulan   | 4      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO   | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|--|---|---|---|--------|---------|
|  |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
| 19   | Asistensi/Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran | Memperlancar dan membangun koorniasdinasi dalam kerangka pencegahan dan pengendalian pengelolaan anggaran   | Jumlah Laporan Asistensi/Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran Per Triwulan | 4      | Laporan |
| 20   | Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB                                    | Menjamin terlaksanakannya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik  | Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB   | 1      | Laporan |
| <b>B. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan</b> |   |   |   |        |         |
| 1  | Audit Universe  | Sebagai upaya penyempurnaan atas kebijakan pengawasan dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan dan   | Jumlah Laporan Audit Universe   | 1      | Laporan |
| 2  | Kebijakan Pengawasan Internal                                       | Piagam Internal Audit   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan Internal (PKPT)   | 1      | Dokumen |
| 3  | IAC (Intern Audit Charter)  |   | Jumlah Dokumen Intern Audit Charter   | 1      | Dokumen |
| 4  | Penerapan dan Pengembangan SPIP                                     | Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penerapan dan Pengembangan SPIP  | 1      | Laporan |
| 5  | Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                   | Mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan  | Jumlah Laporan Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                                | 1      | Laporan |
| 6  | Pelaksanaan Peningkatan   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan  | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA                                | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|----|---|---|---|--------|---------|
|    |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
|    | Internal Auditor Capability Model (IACM)      | efektif termasuk survei kepuasan APIP   | Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)          |        |         |
| 7  | SKP Tahun 2023 TW 4                           | Bentuk penilaian atas kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan serta memastikan level kompetensi APIP   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2023 TW 4                            | 6      | Dokumen |
| 8  | SKP Tahun 2023                                |   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2023                                 | 6      | Dokumen |
| 9  | SKP Rencana Tahun 2024                        |   | Jumlah Dokumen SKP Rencana 2024                               | 6      | Dokumen |
| 10 | SKP Tahun 2024 Peroidik s.d. TW 3             |   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2024 Peroidik s.d. TW 3              | 18     | Dokumen |
| 11 | Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK |   | Jumlah Laporan Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK  | 1      | Laporan |
| 12 | Penyampaian Pelaporan SPT                     | Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mencegah korupsi, dan meningkatkan ketaatan penyelenggara negara dan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penyampaian SPT                                | 1      | Laporan |
| 13 | Penyampaian Pelaporan Gratifikasi             |   | Jumlah Laporan Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Per Semester | 2      | Laporan |
| 14 | Penyampaian Penyusunan LHKPN                  |   | Jumlah Laporan Penyampaian Penyusunan LHKPN                   | 1      | Laporan |
| 15 | Hasil Audit Tahunan                           | Agar tercapai dokumen hasil pelaksanaan pengawasan selama jangka waktu yang ditetapkan  | Jumlah Laporan Hasil Audit Tahunan                            | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik





## Jadwal pelaksanaan kegiatan APIP Semester II

| NO | OUTPUT  | JULI |   |   |   | AGUSTUS |   |   |   | SEPTEMBER |   |   |   | OKTOBER |   |   |   | NOVEMBER |   |   |   | DESEMBER |   |   |   |
|----|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Hasil Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) Semester I Tahun 2024                              |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Audit Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Audit Tujuan Tertentu   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 5  | Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal No.9 Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 6  | Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP Per Triwulan   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 7  | Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 8  | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Per Triwulan |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 9  | Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 10 | Reviu Pengawasan PNPB Tahun 2024  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 11 | Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Per Triwulan  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 12 | Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 13 | Reviu PPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 14 | Reviu RKBMN 2026  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 15 | Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 16 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 17 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP Per Triwulan   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

| NO | OUTPUT   | JULI |   |   |   | AGUSTUS |   |   |   | SEPTEMBER |   |   |   | OKTOBER |   |   |   | NOVEMBER |   |   |   | DESEMBER |   |   |   |
|----|--|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Audit Universe   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 19 | Kebijakan Pengawasan Internal (Program Kerja Pengawasan Tahunan)                 |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 20 | IAC (Intern Audit Charter)   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 21 | Penerapan dan Pengembangan SPIP  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 22 | Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                                |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 23 | Pelaksanaan Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)                 |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 24 | SKP Tahun 2023 Peroidik TW 4   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 25 | SKP Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 26 | SKP Rencana Tahun 2024   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 27 | SKP Tahun 2024 Peroidik s.d. TW 3  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 28 | Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK                                    |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 29 | Penyampaian Pelaporan SPT  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 30 | Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Per Semester                                   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 31 | Penyampaian Penyusunan LHKPN   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 32 | Hasil Audit Tahunan  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 33 | Asistensi/konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran Per Triwulan |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 34 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

Keterangan:

|  |                       |  |                       |  |             |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|
|  | Persiapan Pelaksanaan |  | Pelaporan Pelaksanaan |  | Pelaksanaan |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**







SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,




Dalam rangka melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini memberi Instruksi:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal. 

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tanggal 23 Januari 2024  
Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan  
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu arah kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah pemerintah fokus terhadap peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan tata kelola dan kinerja, hal tersebut juga sudah diamanatkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif, serta birokrasi yang berintegritas, sehingga strategi dan arah kebijakan negara, dengan menetapkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial yaitu meliputi:

1. Audit;
2. Reviu;
3. Evaluasi;
4. Pemantauan atau Monitoring; dan
5. Kegiatan pengawasan lainnya.

---

#### **Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE** 

## B. Tujuan

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2024;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Yudisial;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

---

### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

## KONDISI DAN TANTANGAN

### A. Kondisi

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi APIP, yaitu:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan PKPT Tahun 2024 dilakukan oleh APIP pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 5 (lima) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan minimal dalam 1 (satu) tim, meliputi tugas audit, reviu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim, sebagai berikut:

| NO | NAMA                | JABATAN       | PERAN                |
|----|---------------------|---------------|----------------------|
| 1  | R. Adha Pamekas     | Kepalaa Biro  | Penanggungjawab      |
| 2  | Ahmad Djaludin      | Kepala Bagian | Koordinator Pengawas |
| 3  | Andri Nurselan      | Auditor       | Pengendali Teknis    |
| 4  | Fajar Dewo Sukmono  | Auditor       | Ketua Tim            |
| 5  | M. Iqbal Heriansyah | Auditor       | Anggota Tim          |
| 6  | Dita Yufitasari     | Auditor       | Anggota Tim          |
| 7  | Muthmainatul Ula    | Auditor       | Anggota Tim          |

#### 2. Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan, Bagian Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:



#### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| KODE                | KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp.)       |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>5267.EBD.965</b> | <b>Layanan Audit Internal</b>   | <b>1.000.000.000</b> |
| 052.A               | Terlaksananya Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) APIP Semester I Tahun 2024 | 113,317,000          |
| 061.A               | Terlaksananya Audit Kinerja   | 315,682,000          |
| 060.A               | Terlaksananya Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   | 57,268,000           |
| 062.A               | Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Sesuai Perintah Pimpinan)  | 143,280,000          |
| 053.A               | Tersusunnya Laporan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan Eksternal      | 16,600,000           |
| 054.A               | Terlaksananya Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025  | 990,000              |
| 054.B               | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LK)   | 990,000              |
| 054.C               | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat   | 990,000              |
| 055.A               | Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  | 11,300,000           |
| 051.A               | Terlaksananya Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal   | 7,600,000            |
| 056.A               | Terlaksananya Penerapan dan Pengembangan SPIP   | 145,613,000          |
| 057.A               | Terlaksananya Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)  | 184,390,000          |
| 058.A               | Terlaksananya Asistensi Penyusunan LHKPN, Pelaporan SPT Dan Gratifikasi   | 990,000              |
| 058.B               | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB  | 990,000              |

## B. Tantangan

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme, dan kinerja APIP yang efisien, efektif dan *agile*.

### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

## PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024

### A. Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 pasal 42, disebutkan: “Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal”, berdasarkan rumusan tersebut ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e) Pengelolaan ketatausahaan terkait kepatuhan internal.

### B. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah seluruh Biro/Pusat di Lingkungan Komisi Yudisial, yang terdiri dari:

1. Biro Umum
2. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
3. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
5. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
6. Biro Investigasi
7. 20 (dua puluh) Kantor Penghubung Komisi Yudisial

---

#### Catatan:

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO           | OBYEK   | ANGGARAN (Rp.)            | SIFAT AKTIVITAS (R/S/T) | MATERIALITAS (R/S/T) |         | TERAKHIR DIAUDIT (Tahun) | TINGKAT RISIKO (R/S/T) | OVERALL RATING |               | AUDIT APPROACH                   | FOKUS PENGAWASAN  |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---|
|              |   |                           |                         | %                    | TINGKAT |                          |                        | SKOR           | SKALA         |                                  |   |
| 1            | Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)                  | Rp 12.197.540.000         | 2                       | 6,50%                | T       | 2023                     | S                      | 1,9            | Tinggi        | Quality Assurance dan Consulting | Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga Profiling Hakim |
| 2            | Biro Investigasi (3866)   | Rp 5.204.501.000          | 1                       | 4,25%                | T       | 2023                     | T                      | 1              | Menengah      |                                  |   |
| 3            | Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas hakim (3872) | Rp 18.098.732.000         | 2                       | 8,65%                | T       | 2023                     | S                      | 2,1            | Tinggi        |                                  | Seleksi Calon Hakim Agung   |
| 4            | Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)                           | Rp 10.002.032.000         | 2                       | 5,54%                | T       | 2023                     | T                      | 2,1            | Tinggi        |                                  | Penanganan Laporan Masyarakat                                     |
| 5            | Biro Umum (3867)  | Rp 107.897.297.000        | 3                       | 67,68%               | T       | 2023                     | T                      | 2,8            | Sangat Tinggi |                                  | Penataan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa dan Aset BMN |
| 6            | Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)                     | Rp 17.466.460.000         | 1                       | 7,38%                | T       | 2023                     | T                      | 1,4            | Menengah      |                                  | Penataan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>Rp 170.866.562.000</b> |                         | <b>100%</b>          |         |                          |                        |                |               |                                  |   |

Sasaran Obyek Pengawasan di atas disusun berdasarkan analisa risiko dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;
2. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat
3. Waktu terakhir di Audit
4. Hasil Audit Pemeriksaan/Pengawasan APIP/BPK T.A sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisa risiko tersebut didapatkan data sebagaimana berikut:

1. Besarnya alokasi anggaran, nilai materialitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat adalah sebagaimana alokasi pada DIPA T.A 2024 sebagaimana yang sudah tersajikan dalam tabel.

2. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat

Berdasarkan kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro Umum mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam mendorong fungsi teknis dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, penataan diawali melalui beberapa *tools* yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial, Kompleksitas tidak saja dari ruang lingkup pekerjaan namun berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Waktu terakhir di Audit

Biro/Pusat terakhir diaudit semester I 2023 oleh APIP KY dan T.A 2022 oleh BPK RI.

4. Hasil Audit Pemeriksaan/Pengawasan APIP/BPK T.A sebelumnya.

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe** 

Selain Biro/Pusat, terdapat 20 Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang menjadi obyek pengawasan. Berikut adalah Peta Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan persebaran risiko.



Tingkat risiko Penghubung Komisi Yudisial di daerah diperoleh dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan di tahun 2023 kepada 12 Penghubung KY. Sementara, untuk 8 Penghubung KY baru yang belum menjadi obyek pengawasan di tahun 2023, tingkat *maturity level* penerapan manajemen risikonya berada pada level Risiko Sangat Tinggi, karena belum terdapat hasil audit.

Kriteria risiko yang digunakan dalam menentukan tingkat risiko adalah sebagai berikut:

| INDEX | DAMPAK        | DESKRIPSI     | RENTANG       | DAMPAK TERHADAP SASARAN (Kualitatif)  | SIMBOL |
|-------|---------------|---------------|---------------|---|--------|
| 5     | Catastrophic  | Sangat Tinggi | < 20,00       | Tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja                                  |        |
| 4     | Significant   | Tinggi        | 20,00 - 39,99 | Tertundanya capaian sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target    |        |
| 3     | Moderate      | Sedang        | 40,00 - 60,00 | Tertundanya tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target           |        |
| 2     | Minor         | Rendah        | 60,01 - 80,00 | Tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target, target kinerja sedikit di bawah target |        |
| 1     | Insignificant | Sangat Rendah | > 80,00       | Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai |        |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe** Balai Sertifikasi Elektronik



Komisi Yudisial belum menerapkan manajemen risiko secara penuh dan terintegrasi, sehingga tingkat *maturity level* penerapan manajemen risiko berada pada level *Initial/Repeatable*. Pemilihan strategi audit terhadap tingkat *Maturity initial/repeatable* lebih banyak dilakukan pada kegiatan *consulting* (pendampingan manajemen risiko, sosialisasi, bimtek, klinik konsultansi) dan kegiatan *assurance* dilakukan dengan pendekatan pemetaan faktor risiko.

### C. Ukuran Keberhasilan

Bagian Kepatuhan Internal selaku APIP dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan anggaran memiliki indikator Capaian/ Keberhasilan yaitu mencapai Tujuan/ Penetapan Kinerja pada Sekretaris Jenderal (Eselon 1) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan internal (Eselon 2) dengan penjelasan sebagai berikut:

Target Kinerja Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal:

| RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KEBRHASILAN  | TARGET NILAI | SATUAN     | KETERANGAN   |
|---|--|--------------|------------|--|
| <b>Sekretaris Jenderal (Eselon I)</b>                             |  |              |            |  |
| Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien                  | Meningkatnya layanan audit dan pengendalian internal         | Baik         | Persepsi   | Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB             |
| <b>Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (Eselon II)</b> |  |              |            |  |
| Meningkatnya layanan audit dan pengendalian internal              | Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti | 100          | Persentase | Berdasarkan Laporan Hasil Audit APIP Tahun 2024                |
|   | Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti | 90           | Persentase | Berdasarkan Hasil Pemantauan Resmi BPK Untuk Temuan Tahun 2023 |
|   | Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti             | 100          | Persentase | Berdasarkan Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi APIP Tahun 2024   |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE** 

|  |                                  |      |       |   |
|--|----------------------------------|------|-------|---|
|  | Peningkatan nilai maturitas SPIP | 3.12 | Nilai | Berdasarkan Surat BPKP perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2023 |
|--|----------------------------------|------|-------|---|

Target Kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah:

| NO   | KOMPONEN KERJA                              | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|--|---|---|---|--------|---------|
|  |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
| <b>A. Program Kerja Pengawasan Tahunan</b> |   |   |   |        |         |
| 1  | Audit Operasional                           | Untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuannya yaitu mendukung kegiatan teknis dan operasional Komisi Yudisial RI | Jumlah Laporan Hasil Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) Semester I Tahun 2024 | 1      | Laporan |
| 2  | Audit Kinerja                               | Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E                                | Jumlah Laporan Audit Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah   | 1      | Laporan |
| 3  | Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   | Untuk memperoleh keyakinan bahwa SMKI sudah sesuai dengan ISO/IEC 27001:2022  | Jumlah Laporan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi  | 1      | Laporan |
| 4  | Audit Tujuan Tertentu                       | Audit yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi.   | Jumlah Laporan Audit Tujuan Tertentu  | 1      | Laporan |
| 5  | Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi | Untuk memperoleh keyakinan bahwa implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal No.9  | Jumlah Laporan Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi  | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT   | VOLUME |         |
|----|---|---|--|--------|---------|
|    |   |   |  | TARGET | SATUAN  |
|    | Sekretaris Jenderal 9/2023  | Tahun 2023 sudah sesuai   | Sekretaris Jenderal No.9 Tahun 2023  |        |         |
| 6  | Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025                            | Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L   | Jumlah Laporan Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025                                      | 1      | Laporan |
| 7  | Reviu Pengawasan PNBPN Tahun 2024   | Mendorong kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBPN   | Jumlah Laporan Reviu Pengawasan PNBPN Tahun 2024   | 1      | Laporan |
| 8  | Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024   | Untuk memperoleh keyakinan terbatas, serta sebagai upaya meningkatkan pengendalian dan manajemen risiko dalam PBJ   | Jumlah Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Per Triwulan  | 4      | Laporan |
| 9  | Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, SMTR I Tahun 2024 dan TW III Tahun 2024 | Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Komisi Yudisial sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024 | 3      | Laporan |
| 10 | Reviu PIPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023                                |   | Jumlah Laporan Reviu PIPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023  | 1      | Laporan |
| 11 | Reviu RKBMN 2026  | Agar rencana kebutuhan BMN tepat manfaat serta mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan TUSI   | Jumlah Laporan Reviu RKBMN 2026  | 1      | Laporan |
| 12 | Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                           | Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas                                | Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                                     | 8      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT   | VOLUME |         |
|----|---|---|--|--------|---------|
|    |   |   |  | TARGET | SATUAN  |
| 14 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat                          | Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi, Satker maupun seluruh unit kerja Eselon II, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil | Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  | 8      | Laporan |
| 15 | Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP                                | Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY)  | Jumlah Laporan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP Per Triwulan   | 4      | Laporan |
| 16 | Pendampingan Pemeriksaan BPK RI   | Fasilitasi dan membangun koordinasi serta kelancaraan pelaksanaan pemeriksaan BPK   | Jumlah Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023   | 1      | Laporan |
| 17 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 | Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Eksternal (BPK RI)  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Per Triwulan | 4      | Laporan |
| 18 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP                    | Untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil reviu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP Per Triwulan   | 4      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO   | KOMPONEN KERJA  | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|--|---|---|---|--------|---------|
|  |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
| 19   | Asistensi/Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran | Memperlancar dan membangun koorniasdinasi dalam kerangka pencegahan dan pengendalian pengelolaan anggaran   | Jumlah Laporan Asistensi/Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran Per Triwulan | 4      | Laporan |
| 20   | Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB                                    | Menjamin terlaksanakannya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik  | Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB   | 1      | Laporan |
| <b>B. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan</b> |   |   |   |        |         |
| 1  | Audit Universe  | Sebagai upaya penyempurnaan atas kebijakan pengawasan dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan dan   | Jumlah Laporan Audit Universe   | 1      | Laporan |
| 2  | Kebijakan Pengawasan Internal                                       | Piagam Internal Audit   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan Internal (PKPT)   | 1      | Dokumen |
| 3  | IAC (Intern Audit Charter)  |   | Jumlah Dokumen Intern Audit Charter   | 1      | Dokumen |
| 4  | Penerapan dan Pengembangan SPIP                                     | Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penerapan dan Pengembangan SPIP  | 1      | Laporan |
| 5  | Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                   | Mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan  | Jumlah Laporan Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                                | 1      | Laporan |
| 6  | Pelaksanaan Peningkatan   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan  | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik

| NO | KOMPONEN KERJA                                | SASARAN/TUJUAN  | OUTPUT  | VOLUME |         |
|----|---|---|---|--------|---------|
|    |   |   |   | TARGET | SATUAN  |
|    | Internal Auditor Capability Model (IACM)      | efektif termasuk survei kepuasan APIP   | Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)          |        |         |
| 7  | SKP Tahun 2023 TW 4                           | Bentuk penilaian atas kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan serta memastikan level kompetensi APIP   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2023 TW 4                            | 6      | Dokumen |
| 8  | SKP Tahun 2023                                |   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2023                                 | 6      | Dokumen |
| 9  | SKP Rencana Tahun 2024                        |   | Jumlah Dokumen SKP Rencana 2024                               | 6      | Dokumen |
| 10 | SKP Tahun 2024 Peroidik s.d. TW 3             |   | Jumlah Dokumen SKP Tahun 2024 Peroidik s.d. TW 3              | 18     | Dokumen |
| 11 | Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK |   | Jumlah Laporan Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK  | 1      | Laporan |
| 12 | Penyampaian Pelaporan SPT                     | Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mencegah korupsi, dan meningkatkan ketaatan penyelenggara negara dan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penyampaian SPT                                | 1      | Laporan |
| 13 | Penyampaian Pelaporan Gratifikasi             |   | Jumlah Laporan Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Per Semester | 2      | Laporan |
| 14 | Penyampaian Penyusunan LHKPN                  |   | Jumlah Laporan Penyampaian Penyusunan LHKPN                   | 1      | Laporan |
| 15 | Hasil Audit Tahunan                           | Agar tercapai dokumen hasil pelaksanaan pengawasan selama jangka waktu yang ditetapkan  | Jumlah Laporan Hasil Audit Tahunan                            | 1      | Laporan |

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**  Balai Sertifikasi Elektronik





## Jadwal pelaksanaan kegiatan APIP Semester II

| NO | OUTPUT  | JULI |   |   |   | AGUSTUS |   |   |   | SEPTEMBER |   |   |   | OKTOBER |   |   |   | NOVEMBER |   |   |   | DESEMBER |   |   |   |
|----|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Hasil Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) Semester I Tahun 2024                              |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Audit Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Audit Tujuan Tertentu   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 5  | Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal No.9 Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 6  | Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Audit APIP Per Triwulan   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 7  | Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 8  | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Per Triwulan |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 9  | Reviu Dokumen Revisi Anggaran dan Reviu RKA-K/L 2025  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 10 | Reviu Pengawasan PNPB Tahun 2024  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 11 | Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Per Triwulan  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 12 | Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 13 | Reviu PPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 14 | Reviu RKBMN 2026  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 15 | Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 16 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 17 | Pelaksanaan Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Reviu APIP Per Triwulan   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

| NO | OUTPUT   | JULI |   |   |   | AGUSTUS |   |   |   | SEPTEMBER |   |   |   | OKTOBER |   |   |   | NOVEMBER |   |   |   | DESEMBER |   |   |   |
|----|--|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Audit Universe   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 19 | Kebijakan Pengawasan Internal (Program Kerja Pengawasan Tahunan)                 |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 20 | IAC (Intern Audit Charter)   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 21 | Penerapan dan Pengembangan SPIP  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 22 | Evaluasi Internal Auditor Capability Model (IACM)                                |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 23 | Pelaksanaan Peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM)                 |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 24 | SKP Tahun 2023 Perodik TW 4  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 25 | SKP Tahun 2023   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 26 | SKP Rencana Tahun 2024   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 27 | SKP Tahun 2024 Perodik s.d. TW 3   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 28 | Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK                                    |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 29 | Penyampaian Pelaporan SPT  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 30 | Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Per Semester                                   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 31 | Penyampaian Penyusunan LHKPN   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 32 | Hasil Audit Tahunan  |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 33 | Asistensi/konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran Per Triwulan |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 34 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

Keterangan:

|  |                       |  |                       |  |             |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|
|  | Persiapan Pelaksanaan |  | Pelaporan Pelaksanaan |  | Pelaksanaan |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

**Catatan:**

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

